



Objek Wisata tak Taati Prokes Diancam Ditutup

Wisatawan lokal DIY dioptimalkan untuk mengunjungi destinasi wisata.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Seluruh destinasi wisata yang ada di DIY dibuka saat libur lebaran 2021. Namun, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo mengatakan, pihaknya akan menutup operasional destinasi wisata jika ditemukan tidak menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Pelanggaran kalau ditemukan (di destinasi wisata) maka ditutup sementara," kata Singgih di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (10/5).

Singgih menuturkan, alasan seluruh destinasi wisata dibuka dikarenakan tidak ada destinasi yang masuk dalam kategori zona oranye dan zona merah Covid-19. Pada masa larangan mudik saat ini, wisatawan lokal DIY dioptimalkan untuk mengunjungi destinasi wisata.

"Seluruh destinasi pariwisata buka kecuali yang masuk dalam zona oranye dan merah wajib tutup atau tidak ada aktivitas kepariwisataan. Berdasarkan data tidak ada satupun destinasi masuk ke zona oranye dan merah," ujarnya.

Pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan di destinasi wisata. Pemantauan dilakukan guna memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto juga meminta agar tidak ada toleransi bagi destinasi wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ia menegaskan agar Pemda menutup destinasi wisata yang kedapatan melanggar agar ada efek jera.

Hingga saat ini penyebaran Covid-19 masih terus terjadi di DIY. Bahkan, di beberapa peningkatan kasus Covid-19 sebelumnya di DIY dikarenakan libur panjang.

"Kalau ada yang tidak menaati tidak perlu pakai surat peringatan, tapi langsung tutup saja. Kalau ada yang main-main dengan protokol kesehatan tidak perlu ditoleransi," kata Eko.

Larangan mudik aglomerasi

Sementara itu, larangan mudik aglomerasi diharapkan dapat diterapkan di DIY untuk menekan potensi penyebaran Covid-19. Sehingga, perjalanan antar kabupaten/kota dalam lingkup DIY atau aglomerasi disarankan hanya untuk yang bersifat khusus atau dalam rangka bertugas.

Dengan begitu, mobilitas bagi warga yang tidak ada keperluan mendesak dapat dibatasi. Tiap kecamatan di seluruh kabupaten/kota pun disarankan memiliki satu alat pendeteksi Covid-19 yakni Genose untuk mendukung

larangan mudik aglomerasi ini.

"Misalnya Pemda DIY melalui APBD yang ada, kemarin *refocusing* anggaran delapan persen untuk penanggulangan Covid-19 dan itu angka yang cukup besar. Setidaknya pemda bisa belikan satu Genose di masing-masing kecamatan," kata Eko.

Eko menyebut setidaknya ada 78 kecamatan di DIY. Jika satu Genose Rp 62 juta, maka Pemda DIY hanya perlu mengeluarkan dana sekitar Rp 4,8 miliar. "Saya kira (Rp 4,8 miliar) tidak besar untuk pengendalian Covid-19," ujarnya.

Jika perlu, katanya, Pemda DIY juga dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengadaan Genose di tiap kecamatan ini. Bahkan, untuk deteksi Covid-19 menggunakan Genose ini juga dapat dikenakan biaya. "Ini (tes Covid-19 dengan Genose di tiap kecamatan) tidak gratis untuk semua, tapi gratis memang hanya untuk masyarakat tidak mampu, bagi yang membutuhkan," jelas Eko.

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut bahwa pihaknya akan mengadopsi kebijakan larangan mudik di wilayah aglomerasi atau mudik lokal sesuai aturan pemerintah pusat. Ia mengatakan, hal ini dilakukan untuk menekan potensi penularan Covid-19 di masa Lebaran.

Pemda DIY sebelumnya hanya melarang mudik atau perjalanan antarprovinsi. Sedangkan, perjalanan antar kabupaten/kota di lingkup DIY masih diperbolehkan. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005